

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa sumber daya dan keterlibatan psikologis secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku tidak memilih (yang dimaknai sebagai hambatan berpartisipasi) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD di Kota Bukittinggi, sedangkan variabel ajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel sumber daya berpengaruh secara negatif, yang berarti semakin tinggi tingkat sumber daya (waktu, finansial, dan *civic skills*) yang dimiliki responden, justru semakin tinggi pula hambatannya untuk berpartisipasi. Selanjutnya, variabel keterlibatan psikologis berpengaruh secara positif, artinya semakin rendah tingkat keterlibatan psikologis (mencakup ketertarikan, efikasi, dan kesadaran politik) seseorang, maka semakin tinggi hambatannya untuk memilih pada PSU.

Penelitian ini menegaskan bahwa pada konteks PSU DPD di Kota Bukittinggi, keputusan untuk tidak memilih lebih didorong oleh faktor-faktor internal yang ada pada diri individu. Rendahnya keterlibatan psikologis menjadi prediktor kuat perilaku tidak memilih, di mana masyarakat yang tidak tertarik, tidak peduli, dan tidak memahami esensi PSU cenderung untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, temuan paradoksal mengenai sumber daya menunjukkan bahwa kepemilikan sumber daya yang tinggi tidak serta-merta menjamin partisipasi dalam

pemilu dengan tingkat atensi yang rendah seperti PSU. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi bahwa dalam konteks PSU DPD Kota Bukittinggi, kombinasi antara rendahnya dorongan psikologis dan kalkulasi sumber daya menjadi penentu atau faktor perilaku tidak memilih, sedangkan faktor eksternal seperti ajakan tidak menjadi faktor perilaku tidak memilih.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi untuk kajian perilaku tidak memilih, khususnya yang menggunakan pendekatan Civic Volunterism Model pada pemilu reguler (bukan pemilu ulangan) dengan sampel yang lebih besar di berbagai daerah.
2. Rendahnya pengetahuan responden alasan PSU menunjukkan adanya kelemahan dalam diseminasi informasi. Diharapkan penyelenggara pemilu dapat merancang strategi sosialisasi yang lebih intensif dan beragam untuk pemilu khusus seperti PSU.
3. Rendahnya pengetahuan mengenai fungsi DPD dan para kandidatnya menunjukkan perlunya peningkatan pendidikan politik bagi warga. Diharapkan masyarakat, melalui organisasi sipil atau komunitas, dapat lebih proaktif mengadakan diskusi-diskusi yang meningkatkan kesadaran akan

pentingnya setiap jenis pemilihan, termasuk DPD, agar partisipasi tidak hanya didasarkan pada popularitas pemilu, tetapi juga pada pemahaman yang utuh.

